

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama pembangunan jangka panjang pertama (Tahun 1969 s/d 1994), penerimaan migas menjadi sumber utama dana pelaksanaan tugas-tugas, fungsi-fungsi dan aktifitas kenegaraan pemerintah. Akan tetapi proporsi penerimaan dari sektor migas terus menurun dari satu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke APBN berikutnya. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai kegiatan pemerintahpun semakin kompleks. Hal ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dibidang lainnya.

Pajak merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar terutama terhadap penerimaan pemerintah guna membiayai pengeluaran pemerintah yang juga sangat besar selain daripada bidang-bidang penerimaan lainnya. Menurut definisi dari Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo , 2003).

Berdasarkan definisi di atas yang menjadi objek Pajak adalah Wajib Pajak atau masyarakat. Wajib Pajak itu sendiri merupakan orang pribadi atau badan yang menurut perundang- undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pajak atau pemotong pajak tertentu.

Dalam melakukan kegiatan perpajakannya Wajib Pajak selalu berhubungan dengan Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) itu sendiri merupakan organisasi pemerintah yang bertugas untuk melayani masyarakat dalam bidang perpajakan. Pada dasarnya pelayanan perpajakan diarahkan kepada usaha untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Wajib Pajak dalam mengurus hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan.

Dalam menghimpun berbagai macam jenis Pajak yang dipungut pemerintah kepada masyarakat, KPP mempunyai peranan yang sangat vital. Hal ini dikarenakan merekalah yang menjadi ujung tombak yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, dan melalui KPP, masyarakat Wajib Pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai metode *Self Assesement*.

Kinerja KPP dalam melayani Wajib Pajak sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan Pajak dari masyarakat. Oleh karena itu efektivitas kinerja KPP dalam melayani masyarakat menarik untuk diketahui.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas Kinerja KPP dilihat dari persepsi Wajib Pajak Badan”. Dari penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk langkah-langkah KPP ke depan.

B. Batasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini agar pembahasan masalah terarah dan tidak terlalu luas karena mengingat waktu, biaya dan kemampuan penulis yang sangat terbatas, maka penulis mambatasi masalah yaitu objek penelitian hanya terbatas pada Wajib Pajak Badan di wilayah KPP Purwokerto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan diajukan adalah: Bagaimanakah Efektivitas Kinerja KPP Purwokerto Dalam Melayani Masyarakat Wajib Pajak menurut Persepsi Wajib Pajak Badan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Kinerja KPP Purwokerto Dalam Melayani Masyarakat Wajib Pajak menurut Persepsi Wajib Pajak Badan.

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan masukan bagi aparat atau jajaran karyawan di KPP Purwokerto dalam usaha untuk meningkatkan mutu pelayanannya dalm hal hak dan kewajiban perpajakan masyarakat Wajib Pajak.

2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas kinerja dari KPP Purwokerto dalam memberikan pelayanan perpajakannya.
 3. Sebagai media penghubung atas persepsi Wajib Pajak terhadap efektivitas dari KPP Purwokerto.
-